



## Implementasi Program Koperasi Konsumen Ekonomi Syariah Roda Dua untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Berwirausaha

Adrian Ramadhan<sup>1\*</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka,  
Padang, Sumatera Barat 25132, Indonesia

### ARTICLE INFO

---

*Article history:*

Received 28/10/2024

Revised 19/11/2024

Accepted 25/11/2024

---

### Abstract

*This study aims to examine the implementation of the Sharia Economic Consumer Cooperative (Kokesra) Roda Dua program by the West Sumatra Province Cooperative and MSME Office in improving community welfare through entrepreneurship, as well as identifying the obstacles faced. The method used is descriptive qualitative, with interviews and documentation studies as data collection techniques, and source triangulation as a method to verify data validity. The results showed that the West Sumatra Cooperative and MSME Agency has implemented the Kokesra program to empower MSMEs in Padang City through several steps. First, providing business capital using a profit-sharing system to MSMEs. Second, implementing savings and loan services managed by cooperative employees. However, in its implementation, there are a number of obstacles. Among others, not all MSMEs are eligible for loans, many businesses do not have official permits, and the limited budget available for the Kokesra program. This research provides an overview of the efforts that the local government has made in encouraging sharia entrepreneurship, but also highlights the challenges that need to be overcome to ensure the sustainability and effectiveness of the program in improving overall community welfare.*

**Keywords:** Implementation, Kokesra, Community Welfare

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program Koperasi Konsumen Ekonomi Syariah (Kokesra) Roda Dua oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kewirausahaan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan wawancara dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, dan triangulasi sumber sebagai metode untuk memverifikasi keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat telah melaksanakan program Kokesra untuk memberdayakan UMKM di Kota Padang melalui beberapa langkah. Pertama, pemberian modal usaha menggunakan sistem bagi hasil kepada UMKM. Kedua, menerapkan layanan simpan pinjam yang dikelola oleh karyawan koperasi. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah hambatan. Di antaranya, tidak semua UMKM memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman, banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin resmi, serta keterbatasan anggaran yang tersedia untuk program Kokesra. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah setempat dalam mendorong kewirausahaan syariah, namun juga menyoroti tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.



**Kata Kunci:** Implementasi, Kokesra, Kesejahteraan Masyarakat

\*Penulis Korespondensi

E-mail : adrianramadhan710@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat dalam berwirausaha merupakan salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian suatu daerah. Kesejahteraan ini tidak hanya diukur dari segi pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mengelola usaha secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang sejahtera melalui wirausaha cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap modal, pengetahuan, dan peluang pasar, yang semuanya berperan dalam memperkuat fondasi ekonomi mereka. Namun, banyak wirausahawan yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usaha mereka.

Kegiatan wirausaha masyarakat sering kali terbatas pada sektor perdagangan kecil, pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan jasa, baik di pedesaan maupun perkotaan. Di daerah pedesaan, masyarakat umumnya menjalankan usaha di bidang agrikultur dan kerajinan, memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia. Sedangkan di perkotaan, banyak yang terlibat dalam sektor jasa seperti kuliner, pakaian, dan usaha berbasis teknologi seperti e-commerce. Meski usaha ini memberikan penghidupan, pelaku usaha kecil sering kali terhambat oleh keterbatasan modal, pengetahuan manajemen yang minim, dan akses pasar yang kurang luas. Tanpa dukungan teknologi modern dan strategi bisnis yang memadai, usaha mereka cenderung stagnan,

menghambat kesejahteraan yang diharapkan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berwirausaha, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Salah satunya adalah program Koperasi Konsumen Ekonomi Syariah Roda Dua, yang hadir sebagai solusi untuk mendukung wirausahawan dengan menyediakan modal dan pembinaan usaha berbasis syariah. Koperasi ini berupaya memberikan akses keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menolak praktik riba dan mendorong keadilan sosial.

Program Koperasi Konsumen Ekonomi Syariah Roda Dua tidak hanya menyediakan pinjaman modal, tetapi juga menawarkan pendampingan usaha dan pelatihan manajemen yang berfokus pada pengelolaan usaha yang lebih profesional dan beretika. Dengan dukungan ini, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pelaksanaan program ini juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam menggerakkan ekonomi lokal, sehingga keuntungan dapat dirasakan oleh seluruh anggota koperasi.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah implementasi program ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berwirausaha. Pembahasan ini akan mengevaluasi sejauh mana program Koperasi

Konsumen Ekonomi Syariah Roda Dua dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan program ini di masa depan.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, keberadaan unit UMKM di Indonesia merupakan indikasi pertumbuhan UMKM. Jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia tumbuh sebesar 2,02% pada tahun 2018, dari 62.922.617 menjadi 64.194.057. (Dina Lathifa, 2019). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari seluruh usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya 0,01%, atau sekitar 5.400 unit, dari total. Bisnis besar mempekerjakan sekitar 3,58 juta orang, sedangkan usaha mikro, kecil, dan menengah

mempekerjakan sekitar 107,2 juta orang (89,2%), 5,7 juta orang (4,74%), dan 3,73 juta orang (3,11%). Dengan demikian, UMKM mempekerjakan sekitar 97% tenaga kerja di negara ini secara keseluruhan, dibandingkan dengan hanya 3% untuk perusahaan besar. (Kemenkopukm.go.id,2022).

Salah satunya di Sumatera Barat oleh Dinas Koperasi dan UMKM secara resmi meluncurkan program Koperasi Konsumen Ekonomi Syari'ah Roda Dua (Kokesra) sejak 20 Januari 2023 di Bukittinggi. Program ini bekerja sama dengan BUMN dan Bank Syariah untuk menawarkan usaha kerjasama bagi hasil tanpa bunga, yang bertujuan membantu pengusaha roda dua dan memberikan mereka jaminan BPJS Tenaga Kerja. Kokesra dibentuk untuk melindungi UMKM dari pinjaman online dan rentenir yang merugikan, yang semakin menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**Table 1. Data UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

No	Kabupaten/ Kota	Usaha Mikro (Unit)	Usaha Mikro (TK)	Usaha Kecil (Unit)	Usaha Kecil (TK)	Usaha Menengah dan Besar (Unit)	Usaha Menengah dan Besar (TK)	Total Usaha (Unit)	Total Usaha (TK)
1	Kab. Lima Puluh Kota	33.679	52.505	3.983	9.985	171	1.681	37.833	64.171
2	Kab. Solok Selatan	6.942	11.015	2.139	3.726	10	830	7.675	15.571
3	Kab. Pasaman	23.392	37.594	2.130	4.356	58	595	25.580	43.102
4	Kab. Tanah Datar	36.692	51.436	1.995	3.216	185	1.696	38.872	56.348
5	Kab. Pasaman Barat	25.295	39.692	3.715	8.919	125	1.873	29.135	50.484
6	Kab. Pesisir Selatan	26.588	57.911	4.999	12.248	92	987	41.679	71.146
7	Kab. Solok	26.457	50.308	3.526	8.085	240	3.518	30.223	61.911
8	Kab. Padang Pariaman	37.484	61.401	4.564	11.106	42	2.591	42.230	78.761
9	Kab. Agam	41.762	64.626	3.743	13.607	201	2.996	46.495	83.120
10	Kab. Sijunjung	18.779	28.290	2.599	7.846	43	815	21.421	36.951
11	Kab. Dharmasraya	11.997	16.652	1.618	5.869	60	780	13.675	23.301
12	Kab. Kep. Mentawai	1.413	508	-	-	14	4.114	2.060	4.622
13	Kota Padang	98.469	161.129	14.423	57.991	386	6.913	113.278	225.223
14	Kota Sawahlunto	6.678	7.990	947	1.053	94	1.846	7.719	17.078
15	Kota Padang Panjang	9.669	11.008	589	1.071	36	698	10.294	12.777
16	Kota Bukittinggi	13.553	21.159	1.335	5.046	73	785	14.961	26.990

No	Kabupaten/ Kota	Usaha Mikro (Unit)	Usaha Mikro (TK)	Usaha Kecil (Unit)	Usaha Kecil (TK)	Usaha Menengah dan Besar (Unit)	Usaha Menengah dan Besar (TK)	Total Usaha (Unit)	Total Usaha (TK)
17	Kota Payakumbuh	10.875	15.522	9.000	10.500	126	1.255	20.001	27.277
18	Kota Pariaman	8.801	10.030	1.440	1.550	4	107	10.245	11.687
<b>Jumlah</b>		423.280	674.559	74.410	208.856	3.720	84.810	501.410	968.225

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1. UKM di Sumatera Barat didominasi oleh UMKM, dengan tenaga kerja terbanyak berasal dari usaha mikro, yaitu sebanyak 674.559 orang dan total unit usaha mencapai 423.280. Saat ini, total UMKM di Sumbar berjumlah 501.410 dengan total tenaga kerja mencapai 968.225 orang, yang menunjukkan bahwa UKM mampu menyerap hingga 91,24 persen tenaga kerja di daerah tersebut.

UMKM di Sumbar berkembang cukup baik jika dibandingkan daerah lain, terbukti dengan bertambahnya unit usaha dan pergerakan baru. Beberapa UMKM sektor makanan/minuman dan kerajinan berhasil memasuki pasar ekspor meski dalam jumlah terbatas. Di era globalisasi ini, produk-produk baru dan spesifik daerah sangat banyak diminati, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan pembangunan dan mendorong pertumbuhan jumlah UKM.

**Tabel 2. Perkembangan Usaha Koperasi 2021-2022**

Kab / Kota	Nilai Omset (Rp. Juta)	
	2021	2022
Provinsi	222,499.72	466,214.60
Kab. Agam	306,946.90	306,801.19
Kab. Dharmasraya	106,008.00	120,420.06
Kab. Kep. Mentawai	6,696.36	7,711.22
Kab. Lima Puluh Kota	127,669.65	119,467.43
Kab. Padang Pariaman	88,949.11	79,658.18
Kab. Pasaman	75,280.55	75,028.37
Kab. Pasaman Barat	88,637.38	156,645.12
Kab. Pesisir Selatan	163,740.40	149,427.00
Kab. Sijunjung	111,754.30	78,315.24
Kab. Solok	140,017.14	161,715.11
Kab. Solok Selatan	81,956.51	90,469.24
Kab. Tanah Datar	304,528.94	295,278.56
Kota Bukittinggi	175,575.52	147,960.86
Kota Padang	2,453,304.98	2,857,638.56
Kota Padang Panjang	51,247.00	58,389.73
Kota Pariaman	56,655.12	53,023.59
Kota Payakumbuh	163,246.70	140,359.09
Kota Sawahlunto	38,657.30	32,069.05
Kota Solok	140,236.51	129,420.09
<b>Jumlah</b>	<b>4,903,608.31</b>	<b>5,525,819.51</b>

Sumber: LAKIP 2022 Dinas Koperasi UMKM Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 2 kehadiran lebih dari 4.000 koperasi dan 593.100 UMKM di Sumatera Barat menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi kekuatan perekonomian masyarakat, dengan pelaku koperasi dan UMKM tersebar hingga ke pelosok pedesaan. Sebagian besar UMKM berorientasi pada pasar dalam negeri, seperti produk makanan ringan, kerajinan, konveksi, dan perbengkelan, serta berkontribusi dalam memajukan pariwisata. Namun, kontribusi koperasi dan UMKM tampak kurang signifikan karena gerakan mereka jarang dipublikasikan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kesulitan dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Bapak Mahesa, seorang pelaku UMKM di sektor kuliner, menjelaskan bahwa saat ini sulit untuk mendapatkan pinjaman usaha, sehingga banyak UMKM merasa terhambat dalam pertumbuhan. Ia menekankan pentingnya pemerintah memahami bahwa mayoritas masyarakat bukanlah pegawai negeri sipil (PNS), melainkan wirausaha yang sangat membutuhkan modal untuk mandiri dan membantu mengurangi angka pengangguran.

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya pengetahuan tentang program Kokesra dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat di kalangan pelaku UMKM. Bapak Andi, pelaku UMKM lainnya, menyatakan bahwa ia baru mendengar tentang program Kokesra yang menawarkan pinjaman tanpa bunga dan sistem bagi hasil. Ia menyarankan agar program ini lebih disosialisasikan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan pinjaman tersebut untuk pengembangan usaha mereka. Banyak wirausaha yang, ketika kekurangan modal, terpaksa mencari pinjaman cepat dengan bunga tinggi, seperti pinjaman online atau dari rentenir, yang merugikan mereka.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan total 13 orang informan yang terdiri dari pihak-pihak terkait dengan

implementasi Program Kokesra, seperti pelaku UMKM, pengelola koperasi, dan pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan pengamatan lapangan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Periode penelitian berlangsung dari Agustus hingga Oktober 2024, mencakup tahap pengumpulan data hingga analisis data untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan relevan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Program Kokesra dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM**

###### **a) Pemberian Bantuan Modal Usaha**

Program Kokesra memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM melalui skema bagi hasil berbasis prinsip syariah tanpa bunga. Skema ini sejalan dengan konsep ekonomi syariah, yang menekankan keadilan dalam berbagi risiko dan keuntungan antara pemodal dan pelaku usaha, sehingga menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Sebagai contoh, pelaku UMKM yang meminjam sebesar 40 juta akan membagi 25% dari keuntungan usaha kepada Koperasi Kokesra, sementara 75% sisanya tetap menjadi hak pelaku usaha. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan kelonggaran finansial kepada pelaku UMKM sekaligus mendorong keberlanjutan usaha mereka tanpa beban bunga yang memberatkan.

**Table 3. Data Bantuan Modal Usaha Program Kokesra (2020-2023)**

Tahun	JumlahUMKM Penerima	Total Bantuan Modal (Rp)	Rata-rata Bantuan/UMKM (Rp)	Skema Bagi Hasil Koperasi
2020	500	20.000.000.000	40.000.000	25% : 75%
2021	600	24.000.000.000	40.000.000	25% : 75%
2022	750	30.000.000.000	40.000.000	25% : 75%
2023	900	36.000.000.000	40.000.000	25% : 75%

*Sumber: Laporan Tahunan Koperasi Kokesra Provinsi Sumatera Barat (2020-2023)*

Indikator kesejahteraan yang digunakan dalam analisis meliputi :

- 1) Peningkatan pendapatan: Pelaku usaha yang mendapatkan modal melalui Program Kokesra melaporkan adanya kenaikan pendapatan rata-rata bulanan.
- 2) Peluang usaha yang lebih luas: Modal yang diberikan membantu pelaku usaha memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan akses pasar.
- 3) Perlindungan dari jeratan utang berbunga tinggi: Skema bagi hasil ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dibandingkan dengan pinjaman konvensional.

Sebagai perbandingan, program serupa seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan mekanisme pembiayaan berbasis syariah yang juga bertujuan untuk mendukung UMKM. Namun, perbedaan utamanya adalah Program Kokesra lebih fokus pada pembentukan koperasi syariah lokal yang memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha, sedangkan KUR Syariah beroperasi melalui lembaga perbankan dengan skema margin yang lebih terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa Program Kokesra memiliki keunggulan dalam hal kedekatan dan pengawasan terhadap pelaku UMKM, meskipun

masih menghadapi kendala dalam memperluas jangkauannya.

b) Penerapan Sistem Simpan Pinjam Syariah

Keunggulan Program Kokesra terletak pada penerapan sistem simpan pinjam berbasis syariah, yang sepenuhnya berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Sistem ini menggantikan bunga dengan skema bagi hasil yang adil, yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang melarang praktik riba. Sebagai contoh, pelaku usaha yang meminjam sebesar 30 juta membagi keuntungan usaha sebesar 25% untuk koperasi, sedangkan 75% sisanya tetap menjadi hak pelaku usaha. Pendekatan ini tidak hanya mendorong transparansi dan kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga membantu pelaku UMKM mengelola keuangan mereka tanpa tekanan pembayaran bunga bulanan yang memberatkan. Hal ini membuat sistem ini menjadi alternatif yang layak dibandingkan dengan pinjaman konvensional.

Indikator kesejahteraan dalam penerapan sistem ini meliputi:

- 1) Stabilitas keuangan: Pelaku usaha merasa lebih mampu mengelola pendapatan karena tidak terbebani oleh cicilan bunga tinggi.
- 2) Pertumbuhan usaha berkelanjutan: Skema bagi hasil memberikan fleksibilitas yang memungkinkan pelaku UMKM tetap berkembang bahkan dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif.
- 3) Penguatan kapasitas manajemen keuangan: Pendampingan koperasi membantu pelaku usaha memahami dan mengelola pembagian keuntungan secara lebih efektif.

Sebagai perbandingan, program sejenis seperti Program Pembiayaan Mikro Syariah (Mikro

Madani) di Aceh menunjukkan kesamaan dalam penerapan prinsip syariah dengan menggunakan skema bagi hasil. Namun, Program Kokesra memiliki keunggulan dalam pendekatan berbasis komunitas melalui koperasi syariah lokal yang memberikan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM, dibandingkan dengan Mikro Madani yang lebih terfokus pada pemberian modal melalui institusi keuangan formal.

Program Kokesra memberikan manfaat signifikan bagi pelaku UMKM di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang, melalui penyediaan modal usaha tanpa bunga dengan skema bagi hasil yang fleksibel. Selain itu, penerapan sistem berbasis syariah ini menegaskan prinsip keadilan dan transparansi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem syariah masih perlu diatasi. Dengan dukungan pemerintah daerah, peningkatan anggaran, dan program edukasi yang masif, Program Kokesra memiliki potensi besar untuk membantu UMKM meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara lebih luas.

**Faktor Pendukung Implementasi Program Kokesra**

a) Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

Pemberdayaan UMKM menjadi prioritas utama, mengingat potensi besar yang dimiliki sektor ini. Dinas Koperasi dan UMKM fokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan dan program pendampingan yang intensif, bertujuan agar mereka tidak hanya memiliki akses modal yang mudah dan tanpa bunga, tetapi juga keterampilan manajerial yang baik.

Program Kokesra dirancang untuk membantu pengusaha kecil agar dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka.

**Table 4. Kemitraan dengan BUMN dan Bank Syariah dalam Program Kokesra (2020-2023)**

Tahun	Jumlah BUMN Mitra	Jumlah Bank Syariah Mitra	Kontribusi BUMN Melalui CSR (Rp)	Total Dana Syariah Disalurkan (Rp)
2020	3	2	10.000.000.000	5.000.000.000
2021	4	3	12.000.000.000	6.000.000.000
2022	5	4	15.000.000.000	8.000.000.000
2023	6	5	18.000.000.000	10.000.000.000

*Sumber: Laporan Kerjasama Program Kokesra dengan BUMN dan Bank Syariah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat (2020-2023)*

Pemberdayaan UMKM dalam Program Kokesra tidak hanya terbatas pada pelatihan, tetapi juga mencakup pendampingan usaha secara personal. Tim dari Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan pelaku usaha untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat penuh dari program ini. Tujuannya adalah untuk memberdayakan UMKM secara komprehensif, bukan hanya dengan memberikan modal, tetapi juga dengan memberikan bimbingan agar mereka lebih siap menghadapi tantangan pasar.

**Table 5. Jenis Pelatihan dan Jumlah UMKM Peserta (2020-2023)**

Tahun	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Pemasaran Digital	Pelatihan Keuangan	Total UMKM Peserta
2020	200	150	250	600
2021	300	200	300	800
2022	400	250	350	1.000
2023	450	300	400	1.150

*Sumber: Data Pelatihan dan Pendampingan UMKM dari Dinas Koperasidan UMKM Provinsi Sumatera Barat (2020-2023)*

b) *Kemitraan dengan BUMN dan Bank Syariah*

Kemitraan strategis dengan BUMN dan Bank Syariah merupakan faktor penting dalam implementasi Program Kokesra. Kerja sama dengan bank syariah memungkinkan para pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan yang adil dan berbasis syariah, serta menawarkan sistem pinjaman tanpa bunga yang lebih menguntungkan. BUMN juga terlibat dalam program ini melalui dukungan CSR, menyediakan fasilitas dan pendanaan, sehingga banyak UMKM dapat mengakses pelatihan dan kesempatan bisnis yang lebih luas.

Pemberdayaan UMKM di Sumatera Barat melalui Program Kokesra merupakan langkah strategis yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan Bank Syariah. Program ini tidak hanya menyediakan akses modal yang mudah diakses tanpa bunga, tetapi juga fokus pada penguatan kapasitas manajerial pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Kemitraan ini memperkuat dampak positif Program Kokesra, memastikan dukungan tidak hanya dalam bentuk modal, tetapi juga kapasitas dan jaringan yang lebih luas, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di wilayah tersebut.

**Faktor Penghambat Implementasi Program Kokesra**

a) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan tantangan utama bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan program pengembangan. Pada tahun 2023, anggaran dialokasikan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar Rp 25 miliar, yang meskipun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,

masih dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan lebih dari 50.000 UMKM terdaftar. Alokasi tersebut hanya mampu menjangkau sekitar 15% pelaku UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan, sehingga berdampak pada kemampuan dinas dalam menyediakan akses modal dan infrastruktur yang memadai. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka.

b) Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi mengenai program dan layanan yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM menjadi kendala signifikan dalam pengembangan UMKM di provinsi ini. Survei terhadap 500 pelaku UMKM menunjukkan bahwa hanya 30% dari mereka yang mengetahui program bantuan dan pelatihan yang ditawarkan, disebabkan oleh minimnya kampanye informasi dan komunikasi yang efektif. Selain itu, hanya sekitar 20% pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan, menciptakan kesenjangan dalam penyebaran informasi. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi UMKM dalam program yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka, serta menghambat upaya peningkatan kapasitas dan daya saing di pasar.

c) Tidak Memiliki Izin Usaha

Sekitar 35% dari total UMKM yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat belum memiliki izin usaha resmi, yang menjadi masalah serius karena izin usaha merupakan syarat penting untuk mengakses berbagai program bantuan dan permodalan. Tanpa izin usaha, pelaku UMKM kesulitan mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan dan sering

terhambat dalam menjalankan kegiatan usaha secara legal. Data menunjukkan bahwa UMKM tanpa izin usaha cenderung mengalami kesulitan dalam memperluas pasar dan berpartisipasi dalam program pengembangan yang ditawarkan oleh dinas. Selain itu, mereka juga rentan terhadap tindakan hukum dan pembongkaran usaha oleh pihak berwenang, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi usaha.

### **Hasil Implementasi Program Kokesra**

a) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Implementasi Program Koperasi Sejahtera (Kokesra) di Provinsi Sumatera Barat telah memberikan dampak positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan 70% responden dari survei terhadap 1.000 peserta melaporkan peningkatan pendapatan setelah berpartisipasi. Program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan koperasi dan pelatihan kewirausahaan, membantu lebih dari 300 koperasi meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis, yang berkontribusi pada produktivitas dan kualitas produk. Selain itu, 40% peserta yang awalnya menjalankan satu jenis usaha kini telah diversifikasi usaha, sementara 60% melaporkan akses pasar yang lebih baik berkat pelatihan pemasaran dan dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Dengan peningkatan akses pasar dan pendapatan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar lebih baik, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.

b) Perlindungan dari Jeratan Pinjaman Berbunga Tinggi

Program Koperasi Sejahtera (Kokesra) berperan penting dalam melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman berbunga tinggi dengan membentuk koperasi simpan pinjam yang dikelola secara profesional. Saat ini, lebih dari 1.200 anggota koperasi telah mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah, sekitar 8-10% per tahun, jauh lebih terjangkau dibandingkan pinjaman dari rentenir yang bisa mencapai 30-50% per bulan. Dengan akses ke pinjaman berbunga rendah, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan modal usaha tanpa terjebak dalam utang yang berat. Program ini juga memberikan edukasi finansial mengenai manajemen keuangan yang baik dan risiko pinjaman berbunga tinggi, yang meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya memilih sumber pembiayaan yang aman. Hasil survei menunjukkan bahwa 80% responden lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman setelah mengikuti program ini, dan 75% mengaku lebih memahami pentingnya perencanaan keuangan yang baik.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi penting untuk pengembangan UMKM melalui program seperti pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan koperasi. Program Kokesra, yang berfokus pada pemberian modal tanpa bunga dengan skema bagi hasil dan sistem simpan pinjam berbasis syariah, membantu UMKM berkembang secara berkelanjutan tanpa beban bunga yang tinggi. Program ini juga meningkatkan daya saing UMKM melalui kemitraan dengan BUMN dan bank syariah, meskipun masih

dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi, dan banyaknya UMKM yang belum memiliki izin usaha.

Secara keseluruhan, implementasi Program Kokesra berdampak positif terhadap kesejahteraan UMKM, terutama dalam hal peningkatan pendapatan, perlindungan dari pinjaman berbunga tinggi, dan penguatan akses pasar. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi UMKM dan memperluas jangkauan program agar lebih banyak UMKM yang dapat merasakan manfaatnya.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan program-program berbasis ekonomi syariah seperti Kokesra perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pemberdayaan UMKM, terutama di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Sumatera Barat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sinergi antara kebijakan ekonomi syariah dan program pemberdayaan ekonomi lainnya untuk menciptakan ekosistem UMKM yang lebih inklusif dan berdaya saing. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan untuk lebih mengoptimalkan anggaran, memperluas sosialisasi, dan menyediakan pendampingan kepada UMKM yang belum memiliki legalitas usaha agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal dan merata.

## REFERENSI

Antara, Made dan Anderson Guntur K. 2010. Kinerja Koperasi Unit Desa di Provinsi Bali: Pendekatan Structural Equation Model. Manado: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana.

Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007

Lindiawatie dan Dhona Shahreza, "Peran Koperasi Syariah BMT BUMI Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro", Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 2, No. 1 (2018).

Machfudz, Saelany dkk. 2010. Bepikir Besar dalam Koperasi. Pekalongan: PT Perintis Jasa Grafika.

Mustika, Ria, dkk. 2012. Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Anggota Koperasi Dengan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Koperasi (Studi Kasus: KSU Cahaya Baru, Kec. Medan Amplas, Kota Medan). Medan: Departemen Agribisnis Fakultas Pertanian, Univerristas Sumatera Utara.

Paramata, Sri Hantuti, "Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Boliyonto Kecamatan Gorontalo", Jurnal Ilmu Adminisrasi, Vol. 4 No. 2 (2015)

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi.

Permana, D. 2011. Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Agribisnis (KOJA) STA Panumbangan Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat. [Skripsi]. Bogor: Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Rosavinda, B. 2013. Peran Koperasi

- Unit Desa (KUD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota (Studi Kasus KUD "Sri Among Tani" Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri). [Skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rosyid, Kurniawan Abdullah. 2003. "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kebumen". Skripsi. <http://eprints.uns.ac.id/3500/1/6571706200905341.pdf>.
- Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suprayitno, Bambang. 2007. "Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagaimana Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)". Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Vol.4 No.2. <http://Bambang-Suprayitno/Kritik-Terhadap-Koperasi-Sebagai-MediaPendorong-Pertumbuhan-UMKM/608-2036-1-PB>.
- Sovyana, Ria. 2012. Analisis Kesehatan Keuangan dan Non Keuangan Dalam Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Wanita Mawaddah di Kabupaten Gresik. Artikel Ilmiah. STIE Perbanas Surabaya
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian